

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN INFLASI

Kevin Brael Agustian *¹
Aprillia Nilasari ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
*e-mail: kevin.21039@mhs.unesa.ac.id¹, aprillianilasari@unesa.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemiskinan DKI Jakarta dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi pada periode 2016 – 2023. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang mencakup analisis regresi data panel dan pendekatan kausal komparatif dengan menggunakan Random Effect Model (REM). Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sementara itu laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Secara bersamaan, variabel - variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta selama periode penelitian

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum

Abstract

The purpose of this study is to determine how the poverty rate of DKI Jakarta is affected by the rate of economic growth, the rate of open unemployment, and inflation the period 2016 - 2023. This study uses a quantitative methodology that includes panel data regression analysis and a comparative causal approach using the Random Effect Model (REM). These findings indicate that inflation has a negative effect on the poverty rate, while the rate of economic growth, and the rate of open unemployment have a positive effect on the poverty rate. Simultaneously, these variables significantly affect the poverty rate in DKI Jakarta Province during the study period.

Keywords: Economic Growth, Inflation, Open Unemployment Rate, Poverty Rate, Minimum Wage

PENDAHULUAN

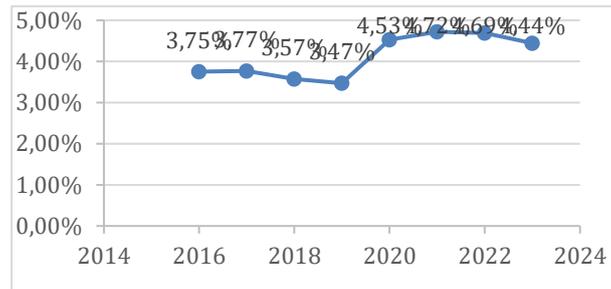
Kemiskinan merupakan fenomena masalah fundamental pada negara berkembang seperti Indonesia sehingga bisa memperlambat tahapan pengembangan perekonomian. Kemiskinan membuat masyarakat tidak mampu mencapai kesejahteraannya karena tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menyelesaikan problematika kemiskinan seharusnya ditanggung bersama, tentu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, dalam penanggulangan kemiskinan (Handayani *et al.*, 2023).

Di Indonesia sendiri fenomena kemiskinan telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah (Kurniadi, 2024). Kemiskinan pada negara berkembang, salah satunya Indonesia, salah satunya dikarenakan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan (Kurniawan, 2018). Pada tahun 2023, data pada Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia berapa di angka 9,36% (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, meskipun terus mengalami tren menurun di setiap tahunnya, tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia belum cukup mencapai target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menargetkan penurunan 6,5% hingga 7,5%, sedangkan pada prakteknya, tingkat kemiskinan hanya menurun sebesar 0,3% hingga 0,5% di tiap tahunnya. (PKP Pasca, 2024).

Adanya penurunan tingkat kemiskinan ini juga dapat dilihat pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Sebagai sebuah wilayah administratif, Ibu Kota Jakarta menonjol dengan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, terutama ditinjau dari aspek komplikasi beban kerja, tingkat pertanggungjawaban, serta berbagai permasalahan yang lebih beragam dan menantang (Huda, 2021). Keseharian masyarakat di Provinsi DKI menyuguhkan panorama kemajemukan, khasanah

tradisi leluhur, serta beragam tujuan wisata yang diakui kualitasnya di kancah global. Meskipun begitu, Ibu Kota Jakarta tetap tidak terhindar dari problematika kesenjangan ekonomi masyarakat. Proses ekspansi wilayah provinsi DKI Jakarta telah mengakibatkan terjadinya konsentrasi populasi yang sangat tinggi. Penyebab utama tren demografis ini berkaitan erat dengan berbagai kegiatan sosial, pergerakan roda perekonomian, serta transaksi bisnis yang mencakup dimensi kedaerahan, tingkat nasional, bahkan sampai ke ranah internasional (Suryaningrum et al., 2023).

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa populasi penduduk di kawasan Jabodetabek telah mencapai 20% dari total penduduk perkotaan di Indonesia, yang mana hal ini memberikan dampak negatif terhadap wilayah konsentrasi (wilayah tujuan) maupun wilayah yang ditinggalkan. (Hadijak & Sadali, 2020).



Gambar 1 Persentase Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

Berdasarkan Gambar 1.1, sepanjang tahun 2016 – 2023, kemiskinan pada DKI Jakarta hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017, sebesar 0,2% serta cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021, berturut turut sebanyak 4,53% dan 4,72% dikarenakan adanya fenomena wabah COVID-19. Walaupun angka penduduk prasejahtera di wilayah Ibu Kota menunjukkan tren penurunan, kondisi ini tidak sepadan dengan laju perkembangan ekonomi yang tercatat sekitar 5% setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari pertumbuhan tersebut terhadap pengentasan masalah kesenjangan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta tergolong minimal (Yurianto. 2019). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tren menurun dari tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, menunjukkan adanya kemajuan dari DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam komitmen fiskal pemerintah DKI Jakarta dengan mengalokasikan sebanyak Rp 17,76 triliun dari APBD tahun 2023 untuk tujuan belanja terkait upaya penanggulangan kemiskinan dan terealisasi sebesar 95,37%. (Bappeda, 2024). Meskipun begitu, dengan tren menurun pada tingkat kemiskinan DKI Jakarta, ketimpangan pendapatan yang ada malah semakin besar.

Aktivitas peningkatan ekonomi dan problematika penduduk prasejahtera menunjukkan relasi yang substansial, dengan kata lain adanya peningkatan ekonomi yang signifikan dapat memberikan pengaruh secara struktural, seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan anggaran sosial pemerintah, sehingga nantinya, peningkatan tersebut dapat mengatasi adanya problematika penduduk prasejahtera.



Gambar 2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

Berdasarkan Gambar 2, grafik laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sampai 2023 menunjukkan pola yang bervariasi. Gambar diatas menunjukkan kondisi ekonomi yang dinamis selama periode lima tahun tersebut. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi berada pada kondisi wajar yaitu 5,88%, hal ini menunjukkan awal yang kuat bagi suatu perekonomian. Akan tetapi, pada tahun 2020 perekonomian menghadapi kejutan karena terjadinya pandemi COVID-19 sehingga laju pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi -2,39%. Pandemi COVID-19 menyumbang pengaruh yang cukup besar pada perekonomian tidak hanya pada penurunan pertumbuhan, tapi variabel-variabel ekonomi lainnya seperti upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, juga tingkat inflasi. Namun pada pasca COVID-19 tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan angka meningkat yang signifikan yaitu 3,55%, dan terus meningkat sampai pada tahun 2022 yaitu 5,25%. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,29% yang mengakibatkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 4,96% yang menandakan adanya sesuatu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta menjadi turun.



Gambar 3 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

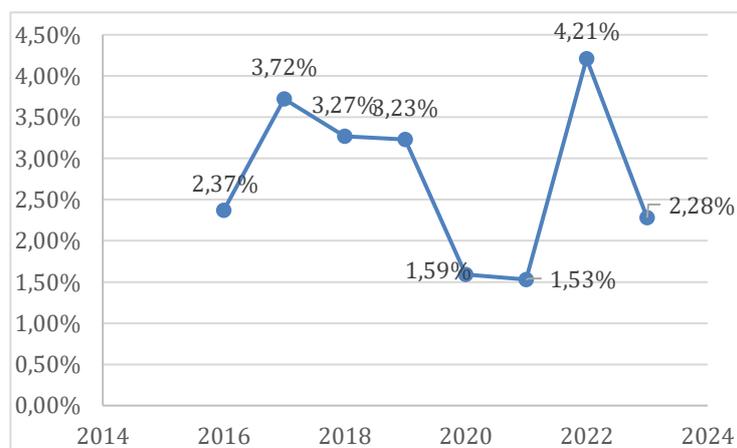
Berdasarkan Gambar 3, menjelaskan bahwasannya kenaikan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016-2023 condong meningkat yang mana pada tahun 2016 sebesar Rp 3.100.000 angka ini terus meningkat sampai menjadi Rp 4.901.798 ditahun 2023. Pada tahun 2020 terjadinya pandemi COVID-19. Namun, pandemi ini tidak berdampak pada upah minimum di Provinsi DKI Jakarta karena pendapatan perusahaan-perusahaan masih tergolong stabil yang dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Penyesuaian nilai upah minimum yang terjadi secara periodik setiap tahunnya dilandasi oleh beberapa faktor pertimbangan penting, seperti perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi para pekerja serta

penerapan sistem pengupahan yang mengandung aspek keadilan, baik ditinjau dari perspektif kelompok buruh maupun dari sudut pandang kalangan pengusaha.



Gambar 4 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

Berdasarkan Gambar 4, pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,12%, menandakan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil. Namun pada tahun 2017 terjadi kenaikan sampai 7,14%, pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,22%, menandakan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan sampai sebesar 10,95% yang dipengaruhi oleh dampak ekonomi global dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pada penurunan aktivitas ekonomi dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian tahun 2021-2023 terjadi penurunan, hal tersebut mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih signifikan dan peningkatan kesempatan kerja.



Gambar 1 Presentase Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

Berdasarkan Gambar 5, inflasi DKI Jakarta yang semula tercatat di atas 2,37% pada periode 2016, meningkat menjadi 3,72% pada periode 2017, kemudian pada periode 2018 sampai dengan periode 2019 cenderung turun sampai pada angka 3,23%. Kemudian turun separuhnya menjadi hanya sekitar 1,59% selama 2020 dan 2021. Pada 2022, tingkat inflasi meningkat tajam seiring pulihnya perekonomian, kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat dan adanya tekanan inflasi global, dimana pulih hingga mencapai angka 4,21% Namun, pada tahun 2023, angka inflasi kembali turun, yakni di angka 2,28% dan menyusul adanya berbagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Meski demikian, tingkat inflasi pada 2023 mendekati tingkat inflasi tahun 2019 yaitu masa sebelum terjadi pandemik COVID-19.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023”.

Kajian Teori

Teori Neo-Liberal

Teori Neo – Liberal memaparkan bahwasannya kemiskinan bukan sebagai persoalan struktural, melainkan sebagai hasil dari kelemahan dan preferensi yang diambil oleh individu sendiri, dimana enomena kemiskinan dapat diatasi melalui ekspansi maksimal mekanisme pasar dan peningkatan optimal laju pertumbuhan ekonomi. (Sukidjo, 2009). Ciri utama dari paham ini adalah adanya gagasan bahwa masyarakat perlu memaksakan adanya tanggung jawab pribadi sebanyak mungkin, salah satunya dalah meningkatkan kesejahteraan. (Schram, 2019). Mullainathan & Safir (2017) menyebutkan bahwa pendekatan ini, apabila diterapkan pada kajian kemiskinan, memiliki manfaat besar, khususnya dalam menempatkan kondisi, perilaku, hingga keyakinan individu dalam konteks yang lebih luas, sehingga akan dapat dipahami alasan seseorang melakukan apa yang orang-orang kerjakan, dan meyakini apa yang orang-orang yakini.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi vital dalam upaya mengurangi kemiskinan, meskipun tidak dapat menyelesaikannya secara menyeluruh. Meskipun penyelesaian masalah kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi tetap dianggap sebagai faktor penentu utama. Dalam pengertiannya, perkembangan ekonomi merujuk pada ekspansi kemampuan berkelanjutan sebuah negara dalam memproduksi dan mendistribusikan beragam komoditas beserta layanan kepada masyarakatnya. Peningkatan kapasitas ini bergantung pada inovasi teknologi, reformasi institusional, dan adaptasi ideologis yang menanggapi kebutuhan dan dinamika kondisi yang ada (Yuniarti et al., 2020).

Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan dan merupakan prasyarat utama untuk penurunan angka kemiskinan. Agar pertumbuhan tersebut efektif, hasilnya harus tersebar merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang hidup dalam kondisi miskin. Hardana et al., (2023) menyatakan bahwasannya terdapat hubungan negatif antara perkembangan perekonomian dengan jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain, ketika terjadi peningkatan pada laju ekonomi, diprediksikan bahwa tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Hubungan ini menyoroti betapa vitalnya akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi sebagai strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, diartikan sebagai kompensasi per bulan minimal yang terdiri dari bayaran dasar ditambah dengan benefit tetap. Sasaran pokok dari penentuan batas penghasilan minimum ini adalah untuk menjamin terpenuhinya standar kehidupan dasar—meliputi dimensi kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk berpenghasilan rendah, terutama kalangan pekerja miskin. Peningkatan upah minimum akan berimbas pada bertambahnya pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan (Ningtias & Anwar, 2021).

Peran serta tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah sangat krusial dalam mengatasi dampak penetapan upah minimum. Dampak tersebut tidak seharusnya hanya ditanggung oleh pihak pengusaha saja. Dengan adanya pemahaman, kesepahaman, dan kerjasama di antara seluruh pihak terkait dalam hubungan industrial, maka tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan buruh, mendorong perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan, serta memungkinkan pemerintah mengelola dan meningkatkan perekonomian secara optimal dapat tercapai (Niswan & Rawa, 2021)

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

Pengangguran terbuka mencakup seluruh anggota angkatan kerja yang tengah mencari pekerjaan, baik bagi mereka yang baru memasuki dunia kerja maupun bagi yang sebelumnya pernah bekerja. Di sisi lain, underemployment (setengah menganggur) merujuk pada individu yang sedang mencari mata pencaharian baik secara penuh waktu maupun paruh waktu atau mereka yang sudah bekerja namun dengan jam kerja yang lebih sedikit dari standar normal (kurang dari 35 jam per minggu). Selain itu, terdapat perbedaan antara underemployment yang bersifat sukarela dan terpaksa; yang pertama mengacu pada individu yang masih mencari pekerjaan meskipun menolak opsi pekerjaan paruh waktu, sementara yang kedua menyebutkan mereka yang sedang mencari pekerjaan dan siap menerima pekerjaan yang ditawarkan. Lebih lanjut, kelompok severe underemployment atau setengah pengangguran parah melibatkan individu yang bekerja kurang dari 25 jam per minggu (Rasbin, 2020).

Pengangguran dan kemiskinan saling berkaitan erat. Bila masyarakat memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, penghasilan tersebut dapat dipergunakan demi memenuhi kelangsungan hidup, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kemiskinan. Dengan begitu, jika persentase pengangguran rendah maka angka kemiskinan cenderung menurun. Persoalan tenaga kerja adalah fenomena yang konkret dan bersinggungan langsung dengan realitas keseharian, bahkan berpotensi menciptakan problematika tambahan, baik dalam dimensi perekonomian maupun bidang non-ekonomi. Tingginya persentase pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan berkorelasi dengan minimnya penghasilan, yang pada gilirannya memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi kemiskinan (Lavenia et al., 2023). Jika tingkat pengangguran di sebuah negara sangat tinggi, maka ketidakstabilan politik dan sosial hampir pasti terjadi, yang selanjutnya akan memberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pertumbuhan ekonomi berkepanjangan.

Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

Inflasi merupakan salah satu penyakit di dalam perekonomian modern saat ini. Inflasi juga membentuk salah satu diantara banyaknya ancaman utama yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi jika dibiarkan begitu saja. Maka, inflasi sebagai suatu penyakit harus tetap dikontrol maupun dikendalikan agar tetap pada tingkat yang wajar dan sesuai dengan perekonomian. Inflasi menunjukkan gambaran kenaikan harga yang terjadi secara berkepanjangan yang dampaknya terhadap individu, para pengusaha, maupun pemerintah, dimana kenaikan harga tersebut terjadi secara umum (Sambuaga et al., 2024). Inflasi juga dapat dikatakan sebagai proses ketidakseimbangan dimana tingkat harga yang mengalami peningkatan secara berkepanjangan.

Inflasi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat. ketika inflasi meningkat maka kemiskinan juga ikut meningkat. Fenomena ini disebabkan oleh naiknya biaya produksi yang secara langsung mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Umumnya, inflasi dianggap normal jika berada di bawah 10%. Namun, jika inflasi berada di kisaran 10% hingga 30%, kondisi tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan ekonomi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Apabila inflasi melampaui 30%, situasi tersebut dikategorikan sebagai inflasi berat (Juliana et al., 2023). Dalam situasi inflasi seperti ini, harga barang dan jasa melonjak secara drastis hingga tak terkendali, yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal-komparatif. Pada penelitian ini, variabel independen yang diuji meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum, Pengangguran terbuka, dan Inflasi sedangkan variabel dependen yang menjadi fokus penelitian ini adalah kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan dan menyumbang gambaran yang lebih komprehensif

mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2023.

Variabel Independen

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang untuk menghasilkan dan mendistribusikan berbagai barang serta layanan ekonomi bagi penduduknya. Proses evolusi ini dipengaruhi oleh inovasi dalam bidang teknologi, reformasi struktur organisasi, serta transformasi pemikiran ideologis yang beradaptasi dengan perubahan situasi dan tuntutan yang terus bermunculan (Yuniarti et al., 2020). Variabel pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan satuan persentase pada tahun 2016-2023 di Provinsi DKI Jakarta.

Upah Minimum (UM)

Standar penghasilan minimum mengacu pada besaran remunerasi bulanan terendah yang meliputi komponen bayaran dasar ditambah dengan benefit reguler. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup mendasar, mencakup dimensi kesehatan, produktivitas dalam bekerja, serta taraf kesejahteraan bagi para tenaga kerja. Variabel tingkat pengangguran upah minimum diukur menggunakan satuan rupiah pada tahun 2016-2023 di Provinsi DKI Jakarta

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka mencakup seluruh individu dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang baru pertama kali memasuki dunia kerja maupun mereka yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan tetapi kini tengah mencari peluang baru. Variabel tingkat pengangguran terbuka diukur menggunakan satuan persentase pada tahun 2016-2023 di Provinsi DKI Jakarta.

Inflasi (IN)

Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus yang dampaknya terhadap individu, para pengusaha, maupun pemerintah, dimana kenaikan harga tersebut terjadi secara umum (Sambuaga et al., 2024). Variabel inflasi diukur menggunakan satuan persentase pada tahun 2016-2023 di Provinsi DKI Jakarta.

Variabel Dependen

Kemiskinan (KMSK)

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup uang serta barang-barang esensial yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, tingkat kemiskinan sering dijadikan indikator utama dalam menilai bagaimana pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Variabel kemiskinan diukur menggunakan satuan persentase pada tahun 2016-2023 di Provinsi DKI Jakarta.

Software yang digunakan untuk melakukan analisis data adalah E-VIEWS Ver. 12, dengan melalui beberapa tahapan uji sebagai berikut :

1. Analisis regresi data panel
2. Uji pemilihan model : Uji chow, Uji Hausman, Uji langrange multiplier
3. Uji asumsi klasik : Uji multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas
4. Uji Hipotesis : Koefisien determinasi, Uji f, Uji t

Model Penelitian

$$KMSK = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 IN_{it} + E_{it}$$

Keterangan :

KMSK = Kemiskinan
 α = Konstanta
 β_1 = Parameter X1
 β_2 = Parameter X2
 β_3 = Parameter X3
 β_4 = Parameter X4
 i = Kabupaten/Kota
 t = Waktu
 PE = Pertumbuhan Ekonomi
 UM = Upah Minimum
 TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
 IN = Inflasi
 Et = Variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinieritas

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

	PE	UM	TPT	IN
PE	1.000	-0.052	-0.274	0.268
UM	-0.052	1.000	-0.195	0.023
TPT	-0.274	-0.195	1.000	-0.474
IN	0.268	0.023	-0.474	1.000

Sumber : Olah data E-views 12

Berdasarkan tabel diatas maka dijelaskan korelasi X1 pada X2 sebesar $-0.052 < 0,80$, koefisien korelasi X1 pada X3 sebesar $-0.274 < 0,80$, dan koefisien korelasi X1 pada X4 sebesar $0.268 < 0,80$, dan korelasi X2 dan X3 sebesar $-0.195 < 0,80$, X2 dan X4 sebesar $0.023 < 0,80$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	5.965447	2.980745	2.001327	0.0517
PE	1.244730	4.410264	0.282235	0.7791
UM	-2.700688	10.61305	-0.254469	0.8003
TPT	-0.302753	0.253751	-1.193109	0.2394
IN	-0.331701	0.428159	-0.774714	0.4427

Sumber : Olah data E-views 12

Bedasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel model 2 di atas diraih hasil signigfikan seluruh variabel berturut-turut sebagai berikut X1 = 0,7791, X2 = 0,8003, X3 = 0,2394 , X4 = 0,4427. hasil tersebut memiliki signifikansi di atas 0,05 atau di atas ambang batas yang mana dapat diartikan bahwasannta variabel pada penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Estimasi Data Panel

Terdapat tiga model pendekatan estimasi data yang dapat digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model pendekatan yang akan digunakan, maka dilakukan beberapa uji, di antaranya yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan juga uji Langrange Multiplier :

Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah model yang digunakan dalam data panel adalah model CEM atau FEM. Hasil uji Chow dilakukan dengan melihat F Restricted, yaitu dengan membandingkan nilai cross-section F. Dalam uji ini terdapat dua hipotesis yaitu :

H0 : CEM

H1 : FEM

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai prob. Cross section F > dari 0,05 , maka diterima H0 dan tolak H1
- Jika nilai prob. Cross section F < dari 0,05 , maka diterima H1 dan tolak H0

Tabel 3 Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-Section F</i>	387.477	(5,38)	0,000
<i>Cross-Section Chi-Square</i>	189.644	5	0,000

Sumber : Olah data E-Views 12

Dari pengolahan data tersebut, didapatkan nilai prob cross-section F, yaitu sebesar 0,0000, yang mana menunjukkan bahwa nilai prob. Cross-section F < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Uji ini menjerima H1 dan Menolak H0, dan model yang akan digunakan Fixed Effect Model (FEM).

Uji Hausman

Uji yang selanjutnya digunakan adalah uji Hausman, dimana uji ini dilakukan untuk dasar pertimbangan dalam memilih menggunakan FEM atau REM. Pengujian ini juga memiliki 2 hipotesis yaitu :

H0 : REM

H1 : FEM

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai prob. Cross section random > dari 0,05 , maka diterima H0 dan tolak H1
- Jika nilai prob. Cross section random < dari 0,05 , maka diterima H1 dan tolak H0

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-sq Statistic</i>	<i>Chi-sq d.f.</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-Section Random</i>	0,0000	4	1,00000

Sumber : Olah data E-Views 12

Dari hasil Uji Hausman di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai prob. Cross section Random yang didapatkan adalah sebesar 1,0000, yang mana nilai prob. Cross section random > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Maka model statistik yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Dan dilanjutkan dengan uji Langrange Multiplier

Uji Langrange Multiplier

Uji selanjutnya adalah uji Langrange Multiplier, dimana uji ini dilakukan untuk dasar pertimbangan dalam memilih menggunakan model REM atau CEM. Pengujian ini juga memiliki 2 hipotesis yaitu :

H0 : CEM

H1 : REM

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai prob. Nilai Breush-Pagan > 0,05 maka diterima H0 dan tolak H1
- Jika nilai prob. Nilai Breush-Pagan < 0,05 maka diterima H1 dan tolak H0

Tabel 1 Hasil Uji Langrange Multiple

<i>Alternative</i>	CS-OS	P-OS	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	152.8214 (0,0000)	4.525665 (0,0334)	157.3471 (0,0000)

Sumber : Olah data E-Views 12

Dari hasil Uji Langrange Multiplier di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai prob. Beush-Pagan yang didapatkan adalah sebesar 0,0000, yang mana nilai prob. Cross section random < 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Maka model statistik yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Random Effect Model

Dari hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange Multiplier yang telah dilakukan, maka akan didapatkan model terbaik dalam penelitian ini adalah Random Effect Model. Dengan menggunakan Random Effect Model maka akan diketahui perbedaan pengaruh antara variabel dari tiap kota/kabupaten yang diteliti karena pada model ini lebih menitikberatkan perbedaan dalam memengaruhi variabel independen, sehingga dalam konteks penelitian ini, dapat dilihat bagaimana perbedaan variabel pada setiap kota/kabupaten secara keseluruhan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta. Persamaan model yang digunakan sebagai berikut :

$$KMSK = 2.295687 + 3.472626*PE + 6.4800007*UM + 0,147649*TPT - 0.218832*IN$$

Tabel 6 Hasil Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Stats	Prob.
C	2.295687	1.348988	1.701785	0.0960
PE	3.472626	1.029224	3.374025	0.0016
UM	4.48E-07	1.36e-07	4.753277	0.0000
TPT	0.147649	0.060055	2.458575	0.0181
IN	-0.218832	0.099928	-2.189901	0.0340
<i>R-Squared</i>	0.533766	<i>Mean Dep. Var.</i>		0.412536
<i>Adj. R-Squared</i>	0.490395	<i>S.D. Dep. Var.</i>		0.809906
<i>F-Statistic</i>	12.30708	<i>Sum Squared</i>		14.37379
<i>Prob.(F-Statistic)</i>	0.000001	<i>Durbin-Watson</i>		1.652740

Sumber : Olah data E-Views 12

Pengujian Signifikansi Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi (r-squared) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu model regresi dalam menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai adjusted r-squared maka semakin tinggi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 7 Hasil Koefisien Determinasi

Variable	R-Squared	Adjusted R-Square
KMSK	0.533766	0.490395

Sumber : Olah data E-Views 12

Berdasarkan tabel, nilai adjusted r-squared yang didapatkan adalah sebesar 0.490395 atau 49%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel indeoenden dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 49%, sedangkan 51% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini terjadi karena teori neoliberalisme mengakui kompleksitas sistem ekonomi dan keterbatasan perencanaan pusat.

Uji F-Statistic

Untuk melihat pengaruh variabel – variabel independen secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel dependen, maka dapat digunakan uji F, yaitu dengan membandingkan nilai F-statistik dan F-tabel. Jika F-hitung > F-Tabel, maka model dapat dikatakan signifikan dalam memprediksi atau meramal variabel dependennya. Atau pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai prob. F-Statistic.

Tabel 8 Uji F-Statistic

Variable	F-Statistic	Prob.
KMSK	12.30708	0.000001

Sumber : Olah data E-Views 12

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F-Statistic sebesar 12,30708, dimana nilai F-Statistic 12,30708 > F Tabel ($d_1 = 4$, $d_2 = 43$, $\alpha = 0,05$) 2.61, dengan prob. 0.00001 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan.

Uji t-Statistic

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara parsial (individu) terhadap variabel terikat serta besarnya pengaruh tersebut. Ada tidaknya pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas dari masing – masing variabel bebas. Apabila nilai probabilitas variabel < 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya

Tabel 9 Hasil Uji T-Statistic

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Stats	Prob.
C	2.295687	1.348988	1.701785	0.0960
PE	3.472626	1.029224	3.374025	0.0016
UM	4.48E-07	1.36e-07	4.753277	0.0000
TPT	0.147649	0.060055	2.458575	0.0181
IN	-0.218832	0.099928	-2.189901	0.0340

Sumber : Olah data E-Views 12

Dengan melihat pada output tabel t-statistik di atas, maka didapatkan beberapa pembuktian dari hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu :

- **Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE)**

Nilai t parsial dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan = 3,472626 dengan probablity 0,0016. Dikarenakan 0,0016 < 0,05 maka hipotesis diterima, dimana variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan signifikan secara positif dalam mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan pada penelitian ini

- **Variabel Upah Minimum (UM)**

Nilai t parsial dari variabel upah minimum terhadap tingkat kemiskinan = 6,480007 dengan probablity 0,000. Dikarenakan 0,0000 < 0,05 maka hipotesis diterima, dimana variabel upah minimum memiliki hubungan signifikan secara positif dalam mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan pada penelitian ini

- **Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Nilai t parsial dari variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan = 0,147649 dengan probablity 0,0181. Dikarenakan 0,0181 < 0,05 maka hipotesis diterima, dimana variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan signifikan secara positif dalam mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan pada penelitian ini

- **Variabel Inflasi (IN)**

Nilai t parsial dari variabel Tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan = -0,218832 dengan probablity 0,0340. Dikarenakan $0,0340 < 0,05$ maka hipotesis diterima, dimana variabel tingkat inflasi memiliki hubungan signifikan secara negatif dalam mempengaruhi variabel dependen tingkat kemiskinan pada penelitian yang telah dilakukan

PEMABAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 – 2023

Pada hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial memiliki hubungan signifikan secara positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 – 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan turut meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada pada provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini

Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi DKI Jakarta, yang mana diukur berdasarkan total produksi pada sektor produksi barang dan jasa melalui GDP, justru semakin meningkatkan tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Kuznets, 1973) dalam bukunya yang berjudul *The American Economic Review* yang dipublikasikan oleh American Economic Association, yang menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pendapatan masyarakat semakin merata, yang mana akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan karena adanya pemerataan pendapatan tersebut. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Siregar & Wiksuana (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang terjadi di DKI Jakarta, peningkatan PDB tidak serta merta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, yang mana hal ini menandakan adanya tidakmerataan pertumbuhan pada tiap lini masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Adanya tren positif pada pembangunan ekonomi tidak menciptakan lapangan kerja baru di lapangan, sehingga masyarakat miskin kurang bisa memperbaiki pendapatan yang ia dapatkan, dan menurunkan tingkat pemerataan pendapatan oleh masyarakat. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh (Ishak et al., 2020) yang mengatakan bahwa hasil yang demikian dapat terjadi apabila pembangunan ekonomi lebih berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga tingkat pemerataan terabaikan.

Melihat dari posisi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi terbesar yang ada di pulau Jawa hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi yang ada memiliki kecenderungan tren positif setiap tahunnya, dimana penurunan paling signifikan hanya terjadi pada tahun 2020, ketika Indonesia sedang dilanda oleh wabah pandemi COVID-19, namun kembali mengalami penguatan pada tahun – tahun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta relatif stabil. Namun, kestabilan tersebut tidaklah seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang ada disana, yang salah satunya dikarenakan adanya urbanisasi masyarakat yang tersentralisasi di Jakarta. Banyak masyarakat yang dari wilayah luar Jakarta, dengan berbagai latar belakang kemampuan dan pendidikan, berkeinginan untuk memperbaiki nasib di Jakarta. Hal ini, menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif di DKI Jakarta, kurang bisa mengakomodasi masyarakat DKI Jakarta yang semakin lama semakin bertambah, ditambah lagi fakta bahwa mayoritas masyarakat yang berpindah ke DKI Jakarta dalam niatan untuk mencari kerja merupakan masyarakat yang kurang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam menghadapi persaingan di ibukota. Sehingga, menghambat pemerataan pendapatan dan justru tidak mempengaruhi atau justru meningkatkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Adanya fenomena yang demikian dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah, selaku pembuat regulasi, salah satunya terkait pembangunan ekonomi. Adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa terdapat ketidakefektifan regulasi pembangunan ekonomi yang berlaku hingga saat ini. Pemerintah DKI Jakarta masih menekankan pembangunan ekonomi pada peningkatan yang masif, tanpa melihat apakah

pembangunan tersebut merata. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan mayoritas masih hanya dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah atas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tungkele et al. (2023) dan Ishak et al. (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB berdampak negatif terhadap kemiskinan. , namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2023) serta Budhijana (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh karena belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 - 2023

Pada hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel upah minimum secara parsial memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 - 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pada upah minimum akan semakin menambah tingkat kemiskinan yang ada pada provinsi DKI Jakarta, begitupun sebaliknya. Hal ini juga sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Adanya tingkat upah minimum yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki serta menunda perekrutan karyawan baru karena biaya tenaga kerja yang dirasa tinggi. Dengan begitu, hal tersebut akan meningkatkan pengangguran di masyarakat, yang mana akan berpengaruh juga pada tingkat kemiskinan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam teori ekonomi klasik yang menyebutkan bahwa upah minimum yang terlalu tinggi dapat menciptakan disinsentif bagi perusahaan dalam mempekerjakan lebih banyak pekerja.

Dalam kerangka neoliberalisme, pasar tenaga kerja idealnya beroperasi berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tanpa intervensi eksternal. Ketika pemerintah menetapkan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar, hal ini menciptakan rigiditas upah yang dapat memicu dampak negatif. Lebih lanjut peningkatan Upah Minimum juga dapat mendorong terjadinya kenaikan biaya produksi, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi terhadap harga barang - barang kebutuhan sehari - hari. Pada akhirnya, hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat dengan kelompok penghasilan rendah, dan turut serta meningkatkan tingkat kemiskinan di masyarakat.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurkse (1961), yang menyebutkan bahwa upah minimum yang terus meningkat akan meningkatkan produktivitas pekerja, terutama pada negara - negara berkembang. Dengan upah yang sesuai dengan kebutuhan pekerja, mereka dapat meningkatkan kesehatan dan energi yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan efisiensi pekerjaan dan akhirnya menambah sumber daya yang dimiliki oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan upah yang mencukupi, salah satu kebutuhan masyarakat yang akan terpenuhi adalah kebutuhan terhadap nutrisi, yang mana pekerja yang semakin sehat, akan semakin menguntungkan, dengan kata lain, produktivitas mereka akan meningkat bersamaan dengan bertambahnya upah yang didapatkan (Hanifah & Hanifa, 2021).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agung et al (2018) dan Kusumo (2019), yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan, namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Andiny (2018) dan Romi & Umiyati (2018) yang menjelaskan bahwa upah minimum mempengaruhi secara negatif dan signifikan

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 - 2023

Pada hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial memiliki hubungan signifikan secara positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2023. Hasil ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang semakin tinggi, akan turut meningkatkan tingkat kemiskinan pada Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian. Temuan hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan ini sejalan dengan prinsip fundamental neoliberalisme yang menekankan efisiensi pasar sebagai mekanisme optimal untuk alokasi sumber daya. Dalam perspektif neoliberal, pengangguran merupakan manifestasi dari kegagalan pasar yang disebabkan oleh intervensi pemerintah yang berlebihan dan rigiditas struktural dalam sistem ekonomi.

Hasil ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang menganggur memiliki kontribusi dalam meningkatkan tingkat kemiskinan. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan secara otomatis kehilangan sumber penghasilan utama yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan hingga kesehatan. Dalam konteks provinsi DKI Jakarta, hal ini semakin diperburuk dengan adanya fakta bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat biaya hidup yang tinggi, sehingga seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan akan rawan terjebak dalam kemiskinan dikarenakan tidak mampunya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi. Pendapatan rumah tangga yang menurun juga akan disertai dengan daya beli mereka yang turun, sehingga akan memperburuk kondisi mereka, baik secara medis (kesehatan) maupun sosial (pendidikan), sehingga mempengaruhi produktivitas yang dimiliki tiap individu dan berpotensi semakin menurunkan penghasilan mereka di masa depan, yang kemudian tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akhirnya mereka akan terjerumus dalam jurang kemiskinan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Derek et al. (2023) dan Nurdianti & Samsuddin (2024) yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Namun tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Astuti et al., (2024) dan (Junaedi & Muljaningsih, 2022) yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat DKI Jakarta yang menganggur tergolong masyarakat miskin. Dengan kata lain, meskipun tidak bekerja, masyarakat yang menganggur tersebut masih memiliki sumber pendanaan yang mumpuni bagi dia untuk memnuhi kebutuhan sehari – harinya, baik dari orang tua, saudara ataupun pihak lain. Disamping itu, ada juga beberapa masyarakat yang sedang mempersiapkan untuk membuka usahanya sendiri, dan masyarakat yang sedang menunggu untuk memulai kerja, yang mana golongan tersebut juga termasuk ke dalam pengangguran terbuka. Hal tersebut juga menandakan bahwa tingkat pengangguran bukanlah salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang ada di provinsi DKI Jakarta.

Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 – 2023

Pada hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Inflasi secara parsial memiliki hubungan signifikan secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 – 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat inflasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, begitupun sebaliknya.

Dalam konsep Phillips Curve yang diadopsi dalam pemikiran neoliberal menjelaskan adanya trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam konteks ini, peningkatan inflasi dapat mengindikasikan ekspansi ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan secara tidak langsung mengurangi kemiskinan. Temuan hubungan negatif antara inflasi dan kemiskinan di DKI Jakarta dapat dijelaskan dalam kerangka neoliberalisme sebagai fenomena jangka pendek yang mencerminkan trade-off dalam mekanisme transmisi kebijakan ekonomi. Namun, neoliberalisme tetap menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan harus dicapai melalui reformasi struktural berbasis pasar dan pertumbuhan produktivitas daripada kebijakan inflasi yang dapat menciptakan distorsi dalam jangka panjang.

Inflasi moderat di DKI Jakarta mengindikasikan adanya ekspansi ekonomi yang didorong oleh permintaan yang menciptakan efek ganda dalam perekonomian. Ketika permintaan meningkat, perusahaan-perusahaan mengalami peningkatan permintaan dan penjualan, mendorong mereka untuk meningkatkan produksi dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulsa & Idris (2024) dan Susanto & Pangesti (2021), yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat inflasi akan menurunkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, namun bertentangan dengan temuan Ningsih & Andiny (2018) dan Adella et al. (2023) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang diberikan inflasi terhadap tingkat kemiskinan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 - 2023

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, di antaranya yaitu empat variabel yang telah diteliti pada penelitian ini.

Secara simultan, baik pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi bekerja dan saling berinteraksi dalam menentukan tingkat kemiskinan pada provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan teori trickle down effect, pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada suatu wilayah terjadi bermula dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini juga terlihat pada provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor utama dalam menggerakkan variabel lain untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Namun, pada kenyataan di lapangan, pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta justru meningkatkan tingkat kemiskinan, hal ini salah satunya dikarenakan distribusi pertumbuhan yang tidak merata, seperti berfokus pada sektor padat modal atau berbasis teknologi, sehingga pengaruhnya kurang bisa dirasakan oleh masyarakat miskin, dan berketerampilan rendah.

Namun di sisi lain, adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di provinsi DKI Jakarta akan menyebabkan upah minimum yang diterima oleh pekerja akan ikut meningkat pula. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat teratasi ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka dan memberikan kesempatan pada masyarakat yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya kedua hal tersebut secara langsung dapat berpengaruh dalam memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di provinsi DKI Jakarta, karena peningkatan upah minimum dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok juga ikut membaik. Namun, dalam konteks provinsi DKI Jakarta, pengaruh tersebut dirasa kurang maksimal hingga saat ini. Adanya semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, dibarengi dengan semakin pesat pula masyarakat luar provinsi yang tertarik untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan yang baru, dengan jumlah masyarakat provinsi DKI Jakarta yang kian meningkat setiap tahunnya.

Adanya inflasi juga turut memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Apabila dihubungkan dengan ketiga variabel yang lain, inflasi dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat atau bahkan memperburuk pengaruh variabel lain terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi dapat memperkuat apabila peningkatannya disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga perencanaan akan berbagai kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Namun, inflasi tersebut akan memperburuk apabila kenaikannya tidak disertai pertumbuhan ekonomi, dimana kenaikan berbagai barang pokok akan sulit dikendalikan, dan akan mengurangi manfaat dari kebijakan – kebijakan yang diberlakukan sehingga semakin mempersulit masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Secara keseluruhan, hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka serta inflasi memiliki pengaruh yang cukup kompleks dan saling

terkait pada tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta. Untuk terus menekan tingkat kemiskinan semaksimal mungkin, diperlukan adanya kebijakan yang seimbang, dimana dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif disertai semakin banyak terbukanya lapangan pekerjaan, upah minimum yang memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat, serta pengendalian inflasi agar tidak menggerus daya beli masyarakat, sehingga dampak negatif dari tiap variabel dapat diminimalkan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

- Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan.
- Upah minimum secara parsial memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
- Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta.
- Inflasi memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kemiskinan..
- Secara simultan, keempat variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi, memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleffin, G. S., & Imaningsih, N. (2024). Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 419-432.
- Alfarraby, F., Nurhaliza, K. H., & Annisa, N. A. (2022). Pembangunan Ekonomi Islam Berbasis Komunitas. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 25-36.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. (2023). Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(1), 1-7.
- Badria, F. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipan Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020. *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, 2, 58.
- Bahar, J., Agusssalim, A., & Fitrianti, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Di Daerah Kabupaten: Kasus Kabupaten Bone. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 46-65.
- Bintara, Y. P., & Wahyudi, A. (2023). Mekanisme Pengendalian Inflasi: Pendekatan Islam dalam Memelihara Stabilitas Harga. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3).
- Fahmi, M. P. (2022). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 76-87.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66-67.
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., Lestari, S., & Zein, A. S. (2023). Analisis Hubungan

- Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), 41-49.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79-92.
- Hastin, M., & Siswadhi, F. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 10(1), 1-22.
- Huda, N. M. (2021). *Kajian Terhadap Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Jakarta: Nusamedia.
- Juliana, S. F., Taaha, Y. R., & Guampe, F. A. (2023). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2001-2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 230-239.
- Lavenia, L., Mandai, S., & Lutfi, M. Y. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 319-328.
- Murapi, I., Astarini, D. A. O., & Subudiartha, I. N. (2021). Tingkat Pengangguran Akibat Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(1), 21-30.
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya: Penelitian Ilmu Manajemen*, 6(2), 89-99.
- Nani. (2022). *Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. Jakarta: CV. Visi Intelegensia.
- Nasution, M. I., Fahmi, M., Jufrizen, J., Muslih, M., & Prayogi, M. A. (2020). The Quality of Small and Medium Enterprises Performance Using the Structural Equation Model-Part Least Square, (SEM-PLS). *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(5), 1-7.
- Ningtias, E. N. A., & Anwar, A. F. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1).
- Niswan, E., & Rawa, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Kabupaten Bengkayang: Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Kabupaten Bengkayang. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 7(2), 23-49.
- Oktavera, Y., Hadi, M. F., & Hidayat, M. (2024). Pengaruh Kuantitas Uang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Dengan Mediasi Variabel Inflasi. *Journal of Sustainable Economic Studies*, 1(1), 18-31.
- Putriana, R., & Aji, R. H. S. (2022). Studi atas kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah sebagai penentu pertumbuhan ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 31-48.
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1049-1062.
- Rasbin, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran: Studi Di Kota Yogyakarta Dan Malang. *Kajian*, 23(2), 129-142.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviews*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sabyan, M., & Widyanti, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(3).

- Sahar, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2022. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 21(2), 279-289.
- Sambuaga, O. R., Kalangi, J. B., & Siwu, H. F. D. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(7), 1-14.
- Sembiring, G. B. (2023). The Link Between Economic Growth and Poverty in Indonesia: Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan di Indonesia. *Outline Journal of Economic Studies*, 2(2), 67-71.
- Sikana, N. A. M., & Kusuma, A. M. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 2(2), 136-150.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrum, D. A., Ayuk, N. M. T., Retnowati, D., Damayanti, F., Langoday, T. O., Mas, I. G. A. M. A., & Yasmita, I. G. A. L. (2023). *Pengantar Ekonomi Pembangunan: Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271-278.
- Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 158-176.
- Wati, S. H., & Addin, S. (2023). Analisis Implementasi Teori Kuantitas Pada Komponen M2 dan Inflasi Indonesia Tahun 2010-2022. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 100-107.
- Welang, R., Kawung, G. M., & Siwu, H. F. D. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2022. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(4), 61-71.
- Weriantoni., & Azzahra, A. (2024). *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Berkembang*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Wiryawan, K. J., & Pratiwi, I. A. M. (2024). Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan dan IPM di Provinsi-Provinsi Indonesia. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 198-224.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169-176.
- Yusrie, C. S., Aminah, S., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2021). Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 126-143.
- Yusrya, N. (2023). Analisis Pengaruh Pdb, Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1997-2020. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1017-1028.
- Zakaria, J. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41-53.
- Zuraida, N. A., & Asmara, K. (2024). Analisis Investasi Dalam Negeri, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 552-563.